

## PENGARUH AGLOMERASI, JUMLAH PENDUDUK, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018-2022

Tessa Jessy Anggriani Nababan\* dan Mulyo Hendarto Robertus

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*Corresponding Email: [tessanabbn@students.undip.ac.id](mailto:tessanabbn@students.undip.ac.id)

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the effects of agglomeration, population size, equalization funds, and government spending on regional disparities in South Sumatra Province from 2018 to 2022. This study employs panel data regression analysis using the Random Effect Model (REM) approach to examine the effect of Agglomeration, Population Size, Equalization Funds, and Government Spending on Regional Disparities in South Sumatra Province from 2018 to 2022. The regression results using the Random Effect Model (REM) with the Generalized Least Squares (GLS) method indicate that, partially, the agglomeration variable has a positive and significant effect on regional disparities in South Sumatra Province. Meanwhile, the population size variable has a negative and significant effect on regional disparities in South Sumatra Province, while equalization funds and government spending do not have a significant impact on regional disparities.*

*Keywords: Regional Disparities, Agglomeration, Population Size, Equalization Funds, and Government Spending.*

 <https://doi.org/10.14710/djoe.43411>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

### PENDAHULUAN

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan merupakan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki setiap wilayah. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selamanya disertai dengan pemerataan. Pertukaran atau *trade off* akan muncul pada saat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan dalam suatu pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi difokuskan untuk pemerataan maka dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, sebaliknya, jika pembangunan ekonomi difokuskan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi maka semakin besar kemungkinan terjadinya ketimpangan. Hipotesa Neoklasik menyatakan bahwa, meskipun ketimpangan antar wilayah cenderung meningkat pada awal proses pembangunan, mereka akan semakin menurun seiring berjalannya waktu. Ketimpangan antar wilayah dapat diukur menggunakan Indeks Entropi Theil. Indeks Entropi Theil dapat digunakan untuk mengkaji gambaran ketimpangan antar daerah

dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2003). Perhitungan Indeks Entropi Theil memiliki penafsiran apabila nilai indeks mendekati 1 (satu) artinya sangat timpang, dan sebaliknya apabila nilai indeks mendekati 0 (nol) artinya sangat merata (Sjafrizal, 2018).

Secara administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuk Linggau. Struktur ekonomi setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan berbeda-beda bergantung pada potensi sumber daya alam dan kondisi demografis masing-masing wilayah. Kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha terhadap PDRB dapat menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah.

Indeks Entropi Theil menunjukkan tingkat ketimpangan pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cenderung mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2022 (Tabel 1). Kabupaten Musi Banyuasin menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi, sementara Kabupaten Empat Lawang memiliki tingkat ketimpangan paling rendah di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1. Indeks Entropi Theil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Ogan Komering Ulu	1,194	1,182	1,187	1,168	1,161
Kabupaten Ogan Komering Ilir	0,878	0,868	0,914	0,911	0,909
Kabupaten Muara Enim	1,765	1,760	1,846	1,870	1,899
Kabupaten Lahat	1,238	1,231	1,166	1,163	1,163
Kabupaten Musi Rawas	1,355	1,341	1,385	1,363	1,344
Kabupaten Musi Banyuasin	1,851	1,814	1,908	1,894	1,870
Kabupaten Banyuasin	0,858	0,850	0,863	0,859	0,855
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	0,825	0,812	0,722	0,711	0,696
Kabupaten Ogan Komering Ulur Timur	0,681	0,678	0,696	0,697	0,696
Kabupaten Ogan Ilir	0,826	0,818	0,846	0,843	0,838
Kabupaten Empat Lawang	0,895	0,874	0,635	0,615	0,593
Kabupaten Panukal Abad Lematang Ilir	1,611	1,597	1,548	1,510	1,479
Kabupaten Musi Rawas Utara	1,833	1,792	1,849	1,818	1,795
Kota Palembang	1,427	1,418	1,421	1,422	1,409
Kota Prabumulih	1,838	1,800	1,741	1,707	1,678
Kota Pagar Alam	1,393	1,363	1,302	1,297	1,281
Kota Lubuk Linggau	1,151	1,134	1,129	1,112	1,093

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Ketimpangan antar wilayah muncul secara teoritis oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik. Hipotesis Neoklasik menyatakan bahwa ketimpangan akan meningkat pada proses pembangunan dilaksanakan di negara sedang berkembang karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya

sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial-budaya sehingga akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan (Sjafrizal, 2018). Teori tersebut menjadi dasar dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah sebagai berikut:

**Aglomerasi** merupakan konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi dan penduduk di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan, diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen untuk meminimalisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi (Kuncoro, 2003). Aglomerasi dapat dihitung menggunakan konsep aglomerasi produksi yaitu menggunakan proporsi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi (Sbergami, 2002). Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Muara Enim mempunyai kontribusi PDRB yang lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Jika dilihat dari struktur ekonomi, tingginya kontribusi Kota Palembang merupakan sumbangan dari sektor industri pengolahan yang menunjukkan kinerja yang baik. Sementara struktur ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian.

**Jumlah Penduduk** merupakan total jumlah individu yang tinggal dalam suatu wilayah. Faktor lain yang diduga dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah yaitu adanya perbedaan kondisi demografi yang besar antar wilayah. Kondisi demografi meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan (Sjafrizal, 2018). Daerah dengan kondisi demografinya baik akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga akan mendorong peningkatan investasi ke daerah yang bersangkutan. Kota Palembang menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk tinggi, kemudian diikuti dengan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

**Dana Perimbangan** adalah merupakan dana yang dialokasikan ke daerah yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi investasi pemerintah di Indonesia diformulasikan khusus melalui Dana Perimbangan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. sistem alokasi dana perimbangan memiliki kelemahan setelah sekian lama diterapkan di Indonesia, yakni ketimpangan pembangunan cenderung memburuk, yang disebabkan karena alokasi dana didasarkan pada kemampuan produksi daerah, sehingga daerah yang sudah relatif makmur karena kemampuan produksinya yang tinggi akan mendapat dana lebih banyak, begitupun sebaliknya. Selain itu kelemahan lain seperti keterbatasan kemampuan keuangan negara, yakni proporsi nilai yang dialokasikan pada DAU (Dana Alokasi Umum) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pemerataan pembangunan daerah relatif terbatas, sehingga tidak dapat mengimbangi DBH (Dana Bagi Hasil) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Sjafrizal, 2018). Kabupaten Musi Banyuasin menjadi wilayah yang memiliki realisasi dana perimbangan paling besar

selama tahun 2018-2022, sedangkan yang memiliki realisasi dana perimbangan paling kecil adalah Kota Pagar Alam.

**Belanja pemerintah** merupakan dana yang digunakan pemerintah dalam mendanai suatu kegiatan atau program pemerintah. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dalam dimensi pembangunan “Pemerataan dan Kewilayahan”. Dalam rangka mendukung pembangunan kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada RPJMN Tahun 2020-2024, pemerintah mengalokasikan APBN ke wilayah melalui belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang meningkat sejak implementasi otonomi daerah (Nasution, 2020). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pemerintah atau daerah menurut kelompok belanja dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. realisasi belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selama tahun 2018-2022, terdapat dua daerah dengan realisasi belanja pemerintah terbesar, yakni Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin, sementara dua daerah dengan realisasi belanja pemerintah terkecil ialah Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Provinsi Sumatera Selatan tergolong provinsi yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Pulau Sumatera tahun 2018-2022. Namun, Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki angka Indeks Williamson tertinggi tahun 2018-2022 di Pulau Sumatera. Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dihitung menggunakan Indeks Williamson sehingga penelitian menggunakan data kabupaten/kota untuk merumuskan apakah terjadi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan atau tidak. Penelitian ini berfokus pada ketimpangan antar wilayah kabupaten/kota yang tercermin dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan dihitung menggunakan Indeks Entropi Theil. Penelitian ini mengisi *gap* dari variabel penelitian, periode penelitian, wilayah penelitian, serta perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan tersebut menjadi landasan dilakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Aglomerasi, Jumlah Penduduk, Dana Perimbangan, dan Belanja Pemerintah Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022”.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah menurut Tarigan (2005) adalah pertambahan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah karena adanya peningkatan dalam nilai tambah (*added value*) secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam harga konstan yang mencerminkan pendapatan riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi masih menjadi sasaran utama dalam proses pembangunan oleh pemerintah, terlebih perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Pada era otonomi, setiap daerah saling bersaing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Kemampuan daerah untuk tumbuh

sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang dapat saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya (Sjafrizal, 2018). Menurut Boediono dalam Tarigan (2005), pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat kecenderungan yang berasal dari proses internal perekonomian suatu wilayah, artinya pertumbuhan harus berasal dari kekuatan yang ada dalam perekonomian wilayah tersebut. Hal tersebut karena pertumbuhan ekonomi bisa saja tercipta karena adanya bantuan dana dari pemerintah pusat. Selanjutnya, apabila bantuan dana tersebut dihentikan maka pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut juga akan terhenti.

### **Teori Ketimpangan Antar Wilayah**

Ketimpangan antar wilayah yaitu ketimpangan yang terjadi akibat adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang ada pada setiap wilayah. Perbedaan tersebut menyebabkan kemampuan daerah dalam mendorong proses pembangunan berbeda pula. Oleh karena itu, biasanya pada setiap daerah terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*undeveloped region*). Ketimpangan antar wilayah menggambarkan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, sehingga diperlukan implikasi formulasi kebijakan pembangunan wilayah oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2018). Ketimpangan antar wilayah muncul secara teoritis oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan ekonomi Neo-klasik. Dalam teori ini dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan hipotesis ini kemudian dikenal sebagai Hipotesis Neoklasik. Menurut Hipotesis Neoklasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Kemudian, jika proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pembangunan suatu negara akan mengalami ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi. Selanjutnya, setelah mengalami proses yang terus menerus ketimpangan tersebut akan menurun. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (*reverse U-shape curve*) (Sjafrizal, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari berbagai instansi terkait yakni BPS Indonesia, BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJK) Kementerian Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan penggabungan antara data *time series* dan data *cross section*. *Time series* yang digunakan berupa data sekunder tahunan periode 2018-2022. *Cross section* yang digunakan adalah 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## Definisi Operasional Variabel

### *Ketimpangan Antar Wilayah*

Ketimpangan antar wilayah merupakan kondisi ketidakmerataan pembangunan wilayah yang menyebabkan adanya daerah maju dan daerah tertinggal. Tingkat ketimpangan dihitung menggunakan konsep Indeks Entropi Theil. Formulasi Indeks Entropi Theil sebagai berikut:

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left( \frac{y_{ij}}{Y} \right) \log \left( \frac{\frac{y_{ij}}{Y}}{\frac{n_{ij}}{Ni}} \right) \quad (1)$$

keterangan:

- $y_{ij}$  = PDRB per kapita kabupaten/kota i di provinsi j
- $Y$  = Jumlah PDRB per kapita seluruh provinsi j
- $n_{ij}$  = Jumlah penduduk di kabupaten/kota I di provinsi j
- $n$  = Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan

### *Aglomerasi*

Aglomerasi adalah pemusatan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. Variabel aglomerasi dalam penelitian ini diukur menggunakan proporsi PDRB pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan terhadap PDRB provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2018-2022. Satuan aglomerasi yang digunakan adalah persen. Formulasi konsep aglomerasi produksi sebagai berikut:

$$\text{Aglomerasi} = \frac{\text{PDRB Kabupaten/Kota}}{\text{PDRB Provinsi}} \times 100\% \quad (2)$$

### *Jumlah Penduduk*

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan di suatu daerah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi demografis suatu wilayah dapat dilihat melalui jumlah penduduk dimana dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2018-2022.

### *Dana Perimbangan*

Dana perimbangan merupakan dana yang dialokasikan ke daerah yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang digunakan terdiri atas 3 macam yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Data dana perimbangan diperoleh dari data realisasi dana perimbangan pada 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2018-2022. Satuan dana perimbangan yang digunakan adalah miliar rupiah.

### **Belanja Pemerintah**

Belanja pemerintah merupakan dana yang digunakan pemerintah dalam mendanai suatu kegiatan atau program pemerintah. Data belanja pemerintah berasal dari realisasi belanja pemerintah yang merupakan total penjumlahan dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penelitian ini menggunakan rasio belanja pemerintah terhadap PDRB. Satuan rasio belanja pemerintah yang digunakan adalah persen.

### **Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan untuk regresi data panel dalam penelitian ini adalah *Generalized Least Square* (GLS) dengan alat analisis yang digunakan adalah Eviews 12. Uji pra regresi data panel dilakukan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Setelah terpilih model terbaik, dilakukan deteksi asumsi Gauss-Markov yang digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dalam data dan model penelitian. Deteksi tersebut meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Kemudian dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui kelayakan model penelitian meliputi uji signifikansi parsial (Uji-t), uji signifikansi simultan (Uji-F), dan taksiran  $R^2$ . Model persamaan regresi terhadap variabel dependen ketimpangan wilayah dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$RD_{it} = \beta_0 + \beta_1 AG_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 LOG(DP)_{it} + \beta_4 BP_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

keterangan:

RD = Ketimpangan antar wilayah

AG = Aglomerasi

JP = Jumlah Penduduk

DP = Dana Perimbangan

BP = Belanja Pemerintah

LOG = Logaritma

i = *cross section*

t = *time series*

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1$ -  $\beta_4$  = koefisien

$\varepsilon$  = *error*

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Random Effect Model* (REM) adalah model yang lebih tepat digunakan untuk melakukan regresi data panel. Penelitian ini menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) digunakan dengan memberi pembobotan pada variasi data karena dalam model terdeteksi adanya heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dengan demikian, untuk mengatasi adanya heteroskedastisitas dan autokorelasi tersebut regresi GLS dilakukan.

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi GLS Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.829881	0.406943	4.496656	0.0000
AG	0.102645	0.008995	11.41108	0.0000
JP	-0.002097	0.000159	-13.19231	0.0000
LOG(DP)	-0.008604	0.029589	-0.290770	0.7720
BP	-0.003313	0.003421	-0.968419	0.3358
R-squared	0.694909			
Adjusted R-squared	0.679655			
F-statistic	45.55425			
Prob(F-statistic)	0.000000			

### Uji-t

Uji t dilakukan untuk menguji hubungan regresi secara parsial untuk mengukur tingkat signifikan setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi (Gujarati, 2015). Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai t-statistik variabel aglomerasi lebih besar dari t-tabel ( $11.41108 > 1,66412$ ) dengan nilai probabilitas yaitu 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya, variabel jumlah penduduk memiliki nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel ( $-13.19231 < 1,66412$ ) dengan nilai probabilitas yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Variabel dana perimbangan memiliki nilai t-statistik lebih kecil dari t-tabel ( $-0.290770 < 1,66412$ ) dengan nilai probabilitas yaitu 0,7720 lebih besar dari 0,05. Variabel belanja pemerintah memiliki nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel ( $-0.968419 < 1,66412$ ) dengan nilai probabilitas yaitu 0,3358 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan sedangkan dana perimbangan dan belanja pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah.

### Uji-F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Gujarati, 2015). Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai F-statistik lebih besar dari F-Tabel ( $45.55425 > 2.49$ ) dengan probabilitas sebesar  $0.000000 < 0,05$  dan  $H_1$  diterima. Maka variabel aglomerasi, jumlah penduduk, dana perimbangan, dan belanja pemerintah secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.694909. Hal ini menunjukkan bahwa variabel aglomerasi, jumlah penduduk, dana perimbangan, dan belanja pemerintah dalam model dapat menjelaskan variabel ketimpangan antar wilayah sebesar 69,49%, sedangkan sisanya sebesar 30,51% dijelaskan oleh variabel lain.

## **Interpretasi Hasil**

### ***Pengaruh Aglomerasi terhadap Ketimpangan antar Wilayah***

Bonet (2006) menjelaskan bahwa aglomerasi produksi dapat mempengaruhi kesenjangan wilayah secara langsung, yaitu pada saat terjadinya hambatan mobilitas tenaga kerja antar wilayah, atau saat terjadi surplus tenaga kerja dalam perekonomian. Setiap kenaikan tingkat aglomerasi produksi maka akan meningkatkan ketimpangan antar wilayah. Menurut Sjafrizal (2018) tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah menyebabkan semakin melebarnya ketimpangan pembangunan, karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi. Sebaliknya, daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah akan lebih lambat laju pertumbuhannya. Berdasarkan hasil regresi model ketimpangan antar wilayah, variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wahyuntari dan Pujiati (2016) menunjukkan bahwa aglomerasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Tengah tahun 2009-2013.

### ***Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan antar Wilayah***

Kondisi demografis suatu wilayah dapat dilihat melalui jumlah penduduk dimana dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat (Sjafrizal, 2018). Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja akan menaikkan perekonomian (Arsyad, 1999). Namun, ketika penambahan jumlah penduduk tidak didukung oleh peningkatan produktivitas akan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut. Sehingga peningkatan jumlah penduduk dapat menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan masalah ketimpangan (Rosa dan Sovita, 2016).

### ***Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan antar Wilayah***

Menurut Sjafrizal (2018) sistem alokasi dana perimbangan memiliki kelemahan setelah sekian lama diterapkan di Indonesia, yakni ketimpangan pembangunan cenderung memburuk, yang disebabkan karena alokasi dana didasarkan pada kemampuan produksi daerah, sehingga daerah yang sudah relatif makmur karena kemampuan produksinya yang tinggi akan mendapat dana lebih banyak, begitupun sebaliknya. Selain itu kelemahan ini seperti keterbatasan kemampuan keuangan negara, yakni proporsi nilai yang dialokasikan pada DAU (Dana Alokasi Umum) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pemerataan pembangunan daerah relatif terbatas, sehingga tidak dapat mengimbangi DBH (Dana Bagi Hasil) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada hasil estimasi dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022.

### ***Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan antar Wilayah***

Menurut Jhingan (2016) pengeluaran pemerintah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ketimpangan antar wilayah dan mendorong pemerataan antar wilayah sehingga terciptanya keseimbangan regional. Realisasi belanja pemerintah memiliki tren yang cenderung meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa besarnya kenaikan realisasi belanja pemerintah dapat terserap dengan baik sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Belanja pemerintah dapat mempersempit ketidakmerataan karena ditujukan untuk penyediaan pelayanan publik seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya (Kementerian Keuangan RI, 2017). Pada hasil estimasi belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara parsial variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan sedangkan dana perimbangan dan belanja pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah. Secara simultan variabel aglomerasi, jumlah penduduk, dana perimbangan, dan belanja pemerintah mempengaruhi ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022.

### **SARAN**

Pemerintah perlu mengupayakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya berpusat di beberapa wilayah saja. Pemerintah pusat melalui dana perimbangan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memenuhi program desentralisasi diharapkan pengelolaan alokasi dana diprioritaskan pada program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain dan menggunakan periode waktu yang lebih lama dan tahun studi terbaru sehingga sehingga dapat memprediksi ketimpangan wilayah secara lebih luas.

### **REFERENSI**

- Arsita, A. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, aglomerasi, dan belanja pemerintah daerah terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2013-2017 (Undergraduate thesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49318>
- Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Colombian experience. *The Annals of Regional Science*, 40(3). <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0060-z>

- Faturohman, F. (2022). Analisis ketimpangan pembangunan di wilayah DKI Jakarta tahun 2011-2021 (Undergraduate thesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/96677/>
- Gujarati, D. N. (2015). *Dasar-dasar ekonometrika* (Edisi ke-5, Buku I). Terjemahan: E. Mardanugraha, S. Wardhani, & C. Mangunsong. Jakarta: Salemba Empat.
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (Edisi ke-1). Terjemahan: D. Guritno. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan* (Edisi ke-3). Yogyakarta: AMP YKPN.
- Safitri, E., Erfit, & Junaidi. (2021). Analisis disparitas pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi (segi ekonomi dan non ekonomi). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(1). <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.10156>
- Sbergami, F. (2002). *Agglomeration and economic growth: Some puzzles* (Doctoral dissertation). Geneva: Graduate Institute of International Studies. <https://repository.graduateinstitute.ch/record/297361>
- Sjafrizal. (2018). *Analisis ekonomi regional dan penerapannya di Indonesia* (Edisi ke-1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyuntari, L. I., & Pujiati, A. (2016). Disparitas pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 5(3). <https://journal.unnes.ac.id/>